

**PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DALAM
PENGENDALIAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

LARASATI

14.852.0062



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DALAM
PENGENDALIAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

LARASATI

14.852.0062

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
Gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Medan

Nama : Larasati

NPM : 148520062

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



Drs. Indra Muda, M.AP

Pembimbing I



Beby Masitho Batubara, S.sos, M.AP

Pembimbing II



DR. Fleri Kusmanto, MA

Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2018



[Handwritten Signature]
Arasati

14.852.0062



ABSTRAK

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan sebagai lembaga pemerintah yang menangani langsung masalah pertumbuhan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, ketetapan kebijakan-kebijakan dan program-program dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan, selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan.

Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi. Teknik pengambilan subyek penelitian yakni dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Dari teknik ini diperoleh informan, yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang penyuluhan dan Penggerakan, Kepala Bidang Ketahanan, Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, dan masyarakat yang ikut serta dalam program Keluarga Berencana maupun yang tidak mengikuti program Keluarga Berencana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peranan dalam menekan pertumbuhan penduduk yang meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kegiatan KB, melakukan konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi serta penanggulangan paska pemasangan alat kontrasepsi. Hambatan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu kurangnya tenaga teknis yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur dan tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi hambatan DP2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Peranan, DP2KB, Pertumbuhan, Penduduk

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M Arif Nasution, MA selaku Dekan Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd sebagai Kepala Prodi Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. M. H. Thamrin Nst, M.Si selaku Ketua Sidang Skripsi.
4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Sidang Skripsi.
5. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Pegawai Universitas Medan Area yang telah banyak membantu kelancaran administrasi kepada penulis.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda ALM. MISTO MUSA dan Ibunda tercinta SRI ASTUSI serta seluruh Anggota Keluarga yang selalu memberikan doa, perhatian, materi, nasihat yang tidak pernah henti mengiringi langkah penulis.
10. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi, dan dukungannya kepada penulis.
11. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian/riset di tempat tersebut.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menambah kesempurnaan dari tulisan ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Oktober 2018

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Peranan	6
2.2 Pengertian Pengendalian.....	7
2.3 Pengertian Kependudukan	10
2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	13
2.5 Kebijakan Pengelolaan Laju Pertumbuhan Penduduk	16
2.6 Penelitian Relevan	17
2.7 Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20

3.3 Informan Penelitian	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21
3.5. Teknik Analisa Data.....	22
3.5 Uji Keabsahan Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Medan.....	25
4.1.1 Letak Geografis	27
4.1.2 Visi dan Misi Kota Medan	28
4.1.3 Demografi Penduduk	30
4.2 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan.....	34
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan.....	34
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan.....	36
4.2.3 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan	48
4.2.4 Struktur Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan	50
4.2.5 Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan	51
4.3 PEMBAHASAN	52

4.3.1 Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan	52
4.3.2 peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB melalui jalur pemerintah	55
a. koordinasi, keterpaduan, dan kemitraan dengan lembaga pemerintahan dalam hal KB..	55
b. sosialisasi kegiatan KB kepada masyarakat.....	57
c. pelatihan dan diklat dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.....	61
d. peningkatan kualitas pelayanan di Bidang Infrastruktur maupun jasa	62
4.3.3 peningkatan kesetaraan ber-KB melalui jalur swasta.....	68
4.3.4 Hambatan-hambatan dalam pengendalian jumlah penduduk Kota Medan.....	70
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat, dan menjadi isu yang sangat mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia hal ini menjadi masalah besar dibandingkan dengan negara lain, karena Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Semuanya terkait penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan serta ketersediaan pangan.

Jika dilihat dari segi pembangunan, maka jumlah penduduk sangat berpengaruh dengan masalah pembangunan suatu wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Semakin lengkap data kependudukan yang tersedia maka semakin mudah rencana pembangunan di susun. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu di sebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari

definisi tersebut diharapkan adanya keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk sehingga kehidupan masyarakat dapat terkendali dan seimbang.

Menurut Karmoto (2004:168) dalam dasar-dasar demografi, kebijakan kependudukan utama di Indonesia saat ini adalah kebijakan Keluarga Berencana. Kebijakan ini sudah luas diketahui oleh masyarakat, kebijakan Keluarga Berencana ini telah berhasil mengubah pandangan masyarakat yang pro natalis menjadi anti natalis.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, Dr.Sugiri Syarif menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk saat ini cukup mengkhawatirkan, dimana pertambahan jumlah penduduk tersebut tidak sebanding lagi dengan jumlah kebutuhan pokok, sehingga pemerintah sulit dalam memenuhi kebutuhan pokok. Untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka cara yang paling tepat adalah menurunkan tingkat kelahiran

Kota Medan yang merupakan barometer pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di wilayah Sumatera Utara juga mengalami permasalahan dalam hal padatnya jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk di kota Medan mengakibatkan terdapat banyak lingkungan kumuh yang dari segi ekonomi masyarakatnya masih berada pada garis kemiskinan. Perumahan kumuh tersebut dapat kita lihat di kawasan Medan Utara seperti di Belawan, Labuhan, Tembung, Denai, Sunggal, dan Medan Johor, bahkan pada daerah pusat kota Medan. Kawasan kumuh di Medan Utara merupakan perumahan nelayan yang terletak di bantaran Sungai Deli, sedangkan di pusat kota ada di bantaran Sungai Babura dan daerah pinggir rel kereta api. Munculnya

rumah-rumah kumuh menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Angka laju pertumbuhan penduduk Kota Medan menurut data Badan Pusat Statistik 2015 sebesar 0,89 persen dengan jumlah penduduk sebesar 2.210.624 jiwa, dari data kependudukan tersebut maka dinilai sudah cukup baik walaupun jumlah penduduk Kota Medan sudah melampaui angka 2 juta jiwa, apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali pada masa mendatang dan tidak diantisipasi sesegera mungkin melalui berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang terfokus pada upaya penurunan angka kelahiran. Bila ini tidak diantisipasi di khawatirkan Kota Medan akan terjadi ledakan penduduk.

Sebagai daerah otonom maka di kota Medan dibentuklah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KB). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan kesetaraan gender dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Medan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah kebijakan keluarga berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana teknis di bidang Keluarga Berencana di kota Medan, membuat penulis tertarik untuk mengetahui sejauhmana peranan Lembaga pengendalian penduduk tersebut dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Medan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan?
2. Apakah Faktor-faktor yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam penelitian skripsi selanjutnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya untuk mahasiswa jurusan Administrasi Publik.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari ilmu Administrasi Publik.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi institusi yang terkait dalam menetapkan kebijakan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985:753) peranan di definisikan sebagai suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Sementara itu dalam telaah teoritik menurut Hakim (2014:9) menyebutkan peran (role) berkaitan erat dengan status dan peranan adalah merupakan dinamika dari status. Sehingga dengan demikian Hakim secara tidak langsung ingin menjelaskan pada setiap status terdapat peran. Peran dalam studi ilmu sosial sering dikaitkan dengan struktur sosial sebagaimana Mariati dan Suryawati (2001:69) menjelaskan peranan merupakan unsur-unsur dalam struktur sosial yang mempunyai arti penting bagi sistem sosial dan pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat. Pada pendapat lainnya Rivai (2016:279) menyebutkan untuk meningkatkan peranan yang dilakukan secara individu dan hubungan antar suatu individu yang satu dengan yang lainnya dan hubungan di antara kelompok.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa peranan adalah status yang melekat pada diri seorang individu dan di dalamnya terdapat fungsi yang membedakan fungsi dari status seseorang dengan fungsi dari status orang yang lainnya dalam suatu struktur sosial masyarakat. Dalam perspektif administrasi struktur sosial dapat di ilustrasikan sebagai birokrasi yang di dalamnya terdapat struktur, fungsi dan masyarakat sebagai pegawai di dalam birokrasi. Salah satu

struktur dalam birokrasi contohnya adalah Dinas yang dalam studi ini mengambil kasus pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Ketentuan Peranan

Ketentuan peranan yaitu suatu pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.

2. Gambaran Peranan

Gambaran peranan yaitu suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

3. Harapan Peranan

Harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai organisasi pemerintah kota melaksanakan fungsinya sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

2.2 Pengertian Pengendalian

Dalam arti luas pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan.

Sementara itu Glen A. Welsch, Hilton dan Gordon yang diterjemahkan oleh Purwaningsing dan Maudy Warouw (2000:3) pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan terciptanya tujuan perusahaan.

Beberapa cara pengendalian antara lain sebagai berikut:

1. Melalui sosialisasi

Dengan sosialisasi seseorang menghayati norma-norma, dan nilai-nilai dalam masyarakatnya melalui norma-norma penciptaan kebiasaan dan rasa senang.

2. Melalui tekanan sosial

Seseorang cenderung mengespresikan pernyataan pribadi yang seirama dengan pandangan kelompoknya.

Pengendalian kelompok dapat dibagi dalam dua jenis yaitu:

a. Norma pengendalian kelompok primer

Kelompok ini bersifat informal, kecil, akrab, seperti keluarga atau kelompok bermain. Pengendalian sosial terjadi secara informal, spontan, dan tidak di rencanakan. Seseorang yang melakukan penyimpangan akan diejek, di tertawakan, dikritik, atau disisihkan dari kelompoknya, sebaliknya jika berperilaku menyenangkan akan diterima oleh kelompoknya atau diberi pujian.

b. Norma pengendalian kelompok

Kelompok ini lebih besar dari kelompok primer, lebih impersonal, dan memiliki tujuan yang khusus. Beberapa bentuk pengendalian-pengendalian yang lebih formal merupakan ciri-ciri yang dimiliki

oleh kelompok sekunder, misalnya peraturan resmi, norma hukum, sanksi hukuman formal, pemberian gelar, dan hadiah.

3. Melalui kekuatan

Seseorang tidak mentaati peraturan, kemudian kelompok mencoba memaksanya untuk taat pada peraturan tersebut. Biasanya terdapat pada kelompok yang relatif kecil, misalnya pada masyarakat primitif yang berhasil mengendalikan perilaku para individu dengan menggunakan nilai-nilai adat yang di tunjang oleh pengendalian informal dari kelompok primer.

Peran pranata dan lembaga sosial dalam pengendalian sosial karena usaha penegakan nilai dan norma tidak dapat lagi dilakukan hanya mengendalikan kedadaran warga masyarakat.

Sementara itu Sugiyanto (2002:38) mengemukakan pengendalian merupakan proses yang dijalankan oleh masyarakat yang selalu disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ilmu sosial ada beberapa macam cara untuk mengendalikan masyarakat yaitu:

1. Pengendalian lisan (pengendalian sosial persuasif)

Pengendalian lisan ini diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian simbolik (pengendalian sosial persuasif)

Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan dan lain-lain.

3. Pengendalian kekerasan (pengendalian koeresif)

Pengendalian melalui cara-cara kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan membandingkan prestasi kerja dengan rencana melalui suatu proses sehingga tercapainya kinerja yang efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan kata lain pengendalian merupakan tindakan mengatur laju atau mengontrol jalannya suatu tindakan agar dapat berjalan dengan sistematis dan efisien.

2.3 Pengertian Kependudukan

Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak tinggal di daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain mendefinisikan penduduk sebagai berikut: *penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia*. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan setiap orang atau sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah juga merupakan ruang lingkup dari demografi. Pengertian pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu” untuk pengukuran.

Achmad Faqih (2010:3) mengemukakan kependudukan (*population study*) atau demografi merupakan studi secara sistematis tentang gejala-gejala dan arah perkembangan penduduk di dalam kerangka sosialnya, sehingga banyak hubungan dengan sosiologi, geografi dan disiplin ilmu sosial lainnya. Dimana demografi itu sendiri mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria, seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas.

Sedangkan menurut Yayat Karyana dkk (2017:3) pertumbuhan penduduk itu sendiri di pengaruhi oleh komponen demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi (mobilitas). Kelahiran penduduk menambah jumlah, kematian mengurangi jumlah penduduk, sedangkan migrasi dapat menambah penduduk atau mengurangi penduduk. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar atau mempunyai migrasi positif, maka pengaruh migrasi terhadap pertumbuhan penduduk adalah mengurangi jumlah penduduk.

Dari hasil pertumbuhan penduduk tersebut akan membentuk jumlah, komposisi dan angka pertumbuhan penduduk. Jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk suatu negara yang berbeda dengan jumlah komposisi dan angka pertumbuhan penduduk negara lainnya, maka akan menghasilkan atau

mempunyai masalah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum akan mempengaruhi kebijakan kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi (mobilitas).

Adapun tujuan dari mempelajari kependudukan antara lain yaitu:

1. Mempelajari kualitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu.
2. Menjelaskan perubahan masa lampau, penurunan, persebarannya dengan data yang tersedia.
3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial.
4. Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang, kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensinya.

Dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk, dilakukan pengendalian sosial dimana pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Pengendalian sosial digunakan sebagai dasar untuk menanggulangi masalah

pertumbuhan penduduk karena pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik maka anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang dapat memahami perlunya untuk mematuhi program-program pemerintah yang sudah ada.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada 3 pengendalian dalam ilmu sosial, DP2KB Kota Medan juga dalam menangani masalah

pertumbuhan penduduk menggunakan ketiga pengendalian tersebut. Jika dilihat dari pengendalian lisan, pengendalian lisan ini terlihat pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun aparatur pemerintah, dalam hal pengendalian simbolik yakni dengan mengadakan poster-poster atau iklan mengenai KB, serta pengendalian kekerasan yakni dibuktikan dengan adanya perlindungan hukum atau undang-undang yang mengatur sehingga apabila adanya pelanggaran ataupun penyimpangan wewenang maka ada batasan atau ketentuan yang mengatur.

2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Masalah kependudukan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari negara kita, karena negara kita termasuk salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Laju pertumbuhan di suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian, kesehatan, sosial budaya, tingkat pendidikan, kesejahteraan maupun pembangunan. Dalam latar belakang sudah kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk memegang peranan penting baik dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan.

Menurut Faturohman dkk (2004:63) bahwa masalah kependudukan yang sering muncul di Indonesia adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, struktur umur penduduk yang berusia muda, urbanisasi penduduk yang relatif tinggi dan kualitas sumber daya manusia rendah.

Sumber daya manusia/penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar

dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menjadi beban bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menjadi masalah dalam pembangunan yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Dalam teori pertumbuhan penduduk Sri Adiningsih (2008:160) mengungkapkan bahwa salah satu aspek pertumbuhan penduduk yang paling sulit dipahami adalah kecenderungannya untuk terus-menerus mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk cenderung terus melaju, ada dua alasan utama yang melatar belakangi pertumbuhan penduduk ini. Pertama, adalah tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan hanya dalam waktu yang singkat. Kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan institusional yang mempengaruhi tingkat fertilitas yang ada selama berabad-abad tidak mudah dihilangkan dengan adanya himbauan-himbau dari pemerintah. Kedua, pertumbuhan penduduk usia produktif berjumlah relatif kecil jika dibandingkan dengan penduduk usia lanjut dan usia anak-anak.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan atau pengrusakan terhadap lingkungan, pengangguran dan juga gangguan keamanan, bahkan dapat pula menimbulkan peperangan antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan sistem kependudukan yang

baik agar masalah-masalah yang muncul dari problem kependudukan tidak berimbas pada kriminalitas.

Permasalahan pertumbuhan penduduk seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menuntut pemerintah khususnya instansi yang berkaitan langsung dengan masalah kependudukan untuk mengambil kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disebutkan bahwa BKKBN merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah pertumbuhan penduduk. Fungsi BKKBN itu sendiri tertera pada pasal 3 ayat (1), yang berbunyi:

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dibidang pengendalian pertumbuhan dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2.5 Kebijakan Pengelolaan Laju Pertumbuhan Penduduk

Setiap permasalahan khususnya dalam pemerintahan, menghasilkan suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut sering disebut dengan kebijakan publik. Nugroho Riant (2006:54) mengartikan kebijakan publik tersebut sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Dimana kebijakan publik tersebut merupakan strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, dan untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Perekonomian sering diartikan berada dalam kondisi yang kontraktif, karena perekonomian mengalami kekurangan pengeluaran, akibatnya kemampuan perekonomian untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa menjadi relatif terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi jauh dibawah laju pertumbuhan yang seharusnya atau pertumbuhan potensialnya. Sebaliknya, pada kondisi booming, perekonomian tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian berada dalam kondisi yang ekspansif, dimana perekonomian untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa menjadi relatif lebih tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi jauh diatas laju pertumbuhan yang seharusnya atau pertumbuhan potensialnya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu di perhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka

pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan grup antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika tidak maka kemiskinan dan ketimpangan pendapat akan tetap menjadi masalah pembangunan ekonomi di masa depan.

Secara garis besar tujuan kebijakan kependudukan adalah memelihara keseimbangan antara perubahan dan penyebaran penduduk dengan perkembangan pembangunan sosial-ekonomi, sehingga tingkat hidup layak dapat diberikan pada seluruh penduduk.

2.6 Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang relevan saya kutip dari penelitian saudara Rossy Lambelanova dan Muhammad Ramadhan dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

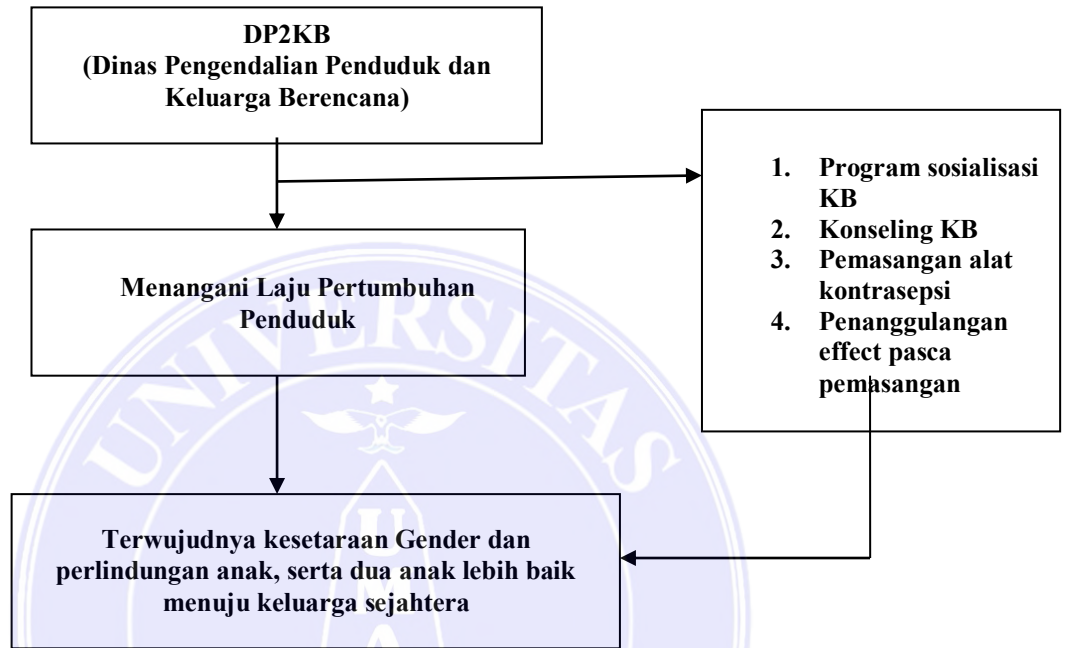
Penelitian tersebut mengemukakan bahwa peranan BPPKB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya data yang menunjukkan laju pertumbuhan yang tidak merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat setiap tahunnya.

Berbagai masalah di lapangan di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program Keluarga Berencana (KB), masyarakat masih ada yang belum sadar akan manfaat dan tujuan dilaksanakannya program KB, Masyarakat yang tidak tahu tentang program KB, masyarakat yang enggan untuk dicampuri urusan rumah tangganya dalam memutuskan memilih program KB, bahkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa urusan dapur rumah tangga bukan urusan pemerintah.

1.7 Kerangka Pemikiran

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan lembaga pemerintah yang sesuai dengan tupoksinya terdapat pada Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan mitra dari BKKBN Pusat dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk. Kebijakan keluarga berencana merupakan kebijakan yang disusun pemerintah dalam menanggulangi pertumbuhan penduduk. Untuk Kota Medan, masalah keluarga berencana ini, berada dalam naungan DP2KB secara khusus Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, mengacu pada kebijakan BKKBN pusat serta sesuai dengan visi lembaga tersebut yakni terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta dua anak lebih baik menuju keluarga sejahtera, menetapkan beberapa kebijakan. Adapun kebijakan yang diambil oleh DP2KB Kota Medan dalam menangani laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan adalah dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat serta swasta. Dimana

kegiatan tersebut dilaksanakan program sosialisasi KB, Konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi serta penanggulangan effect paska pemasangan, hal ini dilakukan apabila ada masyarakat yang mengalami kontraindikasi



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Medan

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibu kota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2012 jumlah penduduk telah mencapai 2.122.804 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional. Secara umum ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota yaitu faktor geografis, faktor demografis, faktor sosial ekonomi.

Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi). Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa

kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang

merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang seajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis, Medan terletak pada $3,30^{\circ}$ - $3,43^{\circ}$ LU dan $98,35^{\circ}$ - $98,44^{\circ}$ BT dengan topografi cenderung miring ke utara. Sebelah barat dan timur Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli dan Serdang. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Letak yang strategis ini menyebabkan Medan berkembang menjadi pintu gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik itu domestik maupun internasional. Kota Medan beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2000-2500 mm per tahun. Suhu udara di Kota Medan berada pada maksimum $32,4^{\circ}\text{C}$ dan minimum 24°C . Kotamadya Medan memiliki 21 Kecamatan dan 158 Kelurahan.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Medan

Secara umum arah dan agenda pembangunan kota mengacu kepada visi :

1. Jangka Panjang (Visi 2025) → Perda Nomor 8 Tahun 2009 : Kota Medan yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan (Indikasi : Income perkapita Rp 72 Juta / tahun)
2. Jangka Menengah (Visi 2015) : Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera
3. Jangka Pendek (Tahun 2011) : Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dinamis dan berkualitas guna menciptakan kesempatan kerjaya yang luas, mengurangi kemiskinan, meningkatkan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Indikasi : Income perkapita menjadi Rp 41,3 Juta dari Rp 36 Juta Tahun 2010)

Misi Pemerintah Kota Medan Tahun 2011

Melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan kota terutama pada 6 (enam) aspek dasar, yaitu :

1. Pelayanan pendidikan baik akses, kualitas maupun manajemen pendidikan yang semakin baik, sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul.
2. Perbaikan infrastruktur, utamanya perbaikan jalan kota, jalan lingkungan, taman kota dan drainase serta penataan pasar tradisional secara simultan.
3. Pelayanan kesehatan, baik akses, mutu maupun manajemen kesehatan yang semakin baik.
3. Peningkatan pelayanan administrasi publik terutama pelayanan KTP/KK/Akte kelahiran dan perizinan usaha.

4. Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan kapasitas dan prestasi kerjanya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
5. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Catatan : Misi ini tidak ringan dan pencapaiannya akan dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Untuk itu, kita harus bekerja lebih efektif.

Rencana Capaian Sasaran Pembangunan Kota Tahun 2011

1. Pencapaian PDRB menjadi sebesar Rp 85,85 Trilyun dari Rp 73,16 Trilyun Tahun 2010. (Oleh karena itu, dunia usaha harus bekerja berdasarkan target PDRB, bukan volume APBD yang hanya sebesar Rp 2,9 Trilyun)
2. Income per kapita sebesar Rp 41,3 Juta dari Rp 36 Juta Tahun 2010. (Hal ini akan mendorong kemampuan berkomunikasi masyarakat dapat lebih meningkat sehingga kesejahteraannya semakin tinggi)
3. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5%-7,7% lebih tinggi dari target propinsi (6,5%) dan nasional (6,2%). (kita sebenarnya harus lebih berani, mematok target menjadi 8%-8,5% untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas)
4. Inflasi dibawah 1 digit (5%-5,5%) untuk menjaga dan meningkatkan daya beli Masyarakat, Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin masing-masing 1% dari tahun 2010.

4.1.3. Demografi Penduduk

Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional. Namun dengan pertumbuhan yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah untuk dicapai. Program kependudukan di kota Medan seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan.

Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang-alik, akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan.

Tabel IV.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun
2015

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	102 988	99 065	202 053
5-9	100 465	95 441	195 906
10-14	93 927	89 405	183 332
15-19	106 067	109 850	251 917
20-24	121 784	128 830	250 614
25-29	98 470	100 090	198 560
30-34	86 995	90 398	177 393
35-39	80 632	84 551	165 183
40-44	73 456	75 953	149 409
45-49	63 207	65 817	129 024
50-54	53 487	56 676	110 163
55-59	43 782	45 175	88 957
60-64	30 684	31 455	62 139
65-69	17 730	19 903	37 633
70-74	10 765	13 714	24 479
75+	7 498	12 364	19 862
Jumlah/total	1 091	1 118 687	2 210

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di kota Medan yang terbesar adalah perempuan, jumlah perempuan terbesar adalah pada rentang usia 20-24 tahun. Usia tersebut termasuk usia produktif, hal inilah yang

memicu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana fokus pelaksanaannya pada perempuan.

Tabel IV. 2

Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Medan Tuntungan	42 288	43 325	85 613
2	Medan Johor	65 207	66 805	132 012
3	Medan Amplas	61 176	62 674	123 850
4	Medan Denai	72 147	73 914	146 061
5	Medan Area	48 897	50 095	98 992
6	Medan Kota	36 769	37 670	74 439
7	Medan Maimun	20 086	20 577	40 663
8	Medan Polonia	27 636	28 313	55 949
9	Medan Baru	20 025	20 515	40 540
10	Medan Selayang	52 433	53 717	106 150
11	Medan Sunggal	57 192	58 593	106 150
12	Medan Helvetia	74 448	76 273	150 721
13	Medan Petisah	31 303	32 071	63 374
14	Medan Barat	35 902	36 781	72 683
15	Medan Timur	55 036	56 384	111 420
16	Medan Perjuangan	47 361	48 521	95 882
17	Medan Tembung	67 759	69 419	137 178
18	Medan Deli	89 632	91 828	181 460
19	Medan Labuhan	58 025	59 447	117 472
20	Medan Marelan	80 152	82 115	162 267
21	Medan Belawan	48 463	49 650	98 113
	Jumlah	1 091 937	1 118 687	2 210 624

Pembangunan Kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian Sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk

yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.

Dalam kependudukan dikenal istilah penduduk. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan di mana tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berfikir masyarakat akibat pendidikan yang di perolehnya, dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Penurunan tingkat kematian disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada tahap ini pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada akhir proses transisi ini, baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah banyak berubah lagi, akibat jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi atau urbanisasi. Komponen kependudukan lainnya umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun cultural. Menurunnya tingkat kelahiran (*fertilitas*) dan tingkat kematian (*mortalitas*), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik (*commuters*), mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan.

4.2 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan

Tugas menurut peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017. Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di pimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan KB, dan melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Walikota Medan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Visi :

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensial untuk terwujud. Visi yang ditetapkan merupakan gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen murni dari seluruh masyarakat dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Medan dalam bidang Keluarga Berencana, maka Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan diharapkan akan dapat mendukung Visi Kota Medan yakni : “Kota Medan menjadi kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera”. Sejalan dengan Visi Kota Medan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan mempunyai Visi : “Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Serta Dua Anak Lebih Baik Menuju Keluarga Sejahtera”.

Misi : Misi adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan Visinya maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan mempunyai Misi :

1. Meningkatkan kesetaraan Gender dan kualitas hidup perempuan dan anak
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan produksi dalam membangun keluarga sejahtera.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan keluarga.

Dari ketiga Misi tersebut, yang menjadi sorotan utama dalam pengendalian jumlah penduduk Kota Medan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan keluarga berencana, kesehatan produksi dan membangun keluarga sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan beberapa program yaitu :

1. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah.
 - a. Melakukan koordinasi, kemitraan dan keterpaduan dengan organisasi pemerintah lain

- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat, seminar, dan pelatihan tugas teknis
 2. Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta.
 - a. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
 - b. Menyediakan pemasangan alat ber-KB sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Peningkatan kualitas pelayanan serta penyediaan alat reproduksi.
 - a. Sosialisasi dengan masyarakat
 - b. Menyediakan konseling KB
 - c. Pengelolaan jasa pelayanan/pemasangan alat kontrasepsi
 - d. Pelayanan dan penanggulangan side effect pasca pemasangan alat kontrasepsi.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang di dukung sebanyak 47 orang PNS dan 6 orang Non PNS, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum. Keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksanaan penyusunan badan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis

- jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
 - d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisi jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
 - e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan, program dan kegiatan, kepegawaian, analisi jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum

lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.

- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dina.
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain :
- a. Kepala sub bagian umum.
 - b. Kepala sub bagian keuangan
 - c. Kepala sub bagian penyusunan program.
6. Kepala Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepretokolan, dan kehumasan.
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,

- unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya.
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksana tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan Dinas.
 - f. Peyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pengelolaan perlengkapan barang milik/kekayaan daerah sarana kantor.
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan penyelenggaraan biaya operasional balaipenyuluhan keluarga berencana.
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris.
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian penyusunan program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bagian sub penyusunan program untuk terselenggaranya aktifitas dan tugas secara optimal.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian penyusunan program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup dinas.
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup sub bagian penyusunan program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Setiap Bidang :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 4 bidang, yaitu : Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan. Dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, kebijakan dari berbagai bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian penduduk.

Dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang pengendalian penduduk dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang pengendalian penduduk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.
- e. Pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.

2. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keluarga berencana.

Dalam hal pengendalian penduduk, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang keluarga berencana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang keluarga berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana
- e. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana.

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam hal pengendalian penduduk, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN lingkup bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan keluarga balita, ketahanan remaja, keluarga lanjut usia, dan rentan.

4. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Kepala bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kepala dinas lingkup penyuluhan dan penggerakan.

Dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan bidang penyuluhan penggerakan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang penyuluhan dan penggerakan untuk terlaksananya aktivitas dan tugas secara optimal.

- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis daerah bidang penyuluhan, advokasi, dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi, dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4.2.3 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
 - 2. Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk .
 - 3. Kepala Seksi Data dan Informasi
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi.

2. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana .
 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
- e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lanjut Usia
 3. Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
1. Kepala Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
 2. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 3. Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perkotaan.
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan.

4.2.4 Struktur Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan

Tabel IV.3

Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Golongan/Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Non PNS/Tenaga Honorer	4	2	6
2.	Golongan I	-	-	-
3	Golongan II	1	3	4
4.	Golongan III	5	26	31
5.	Golongan IV	3	9	12
	Jumlah		53	

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai DP2KB Kota Medan sudah banyak yang berpendidikan, dan sesuai golongan yang dimiliki maka dapat terlihat bahwa sebagian besar pegawai DP2KB Kota Medan sudah sarjana. Artinya sebagian besar pegawai DP2KB Kota Medan sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang berpendidikan.

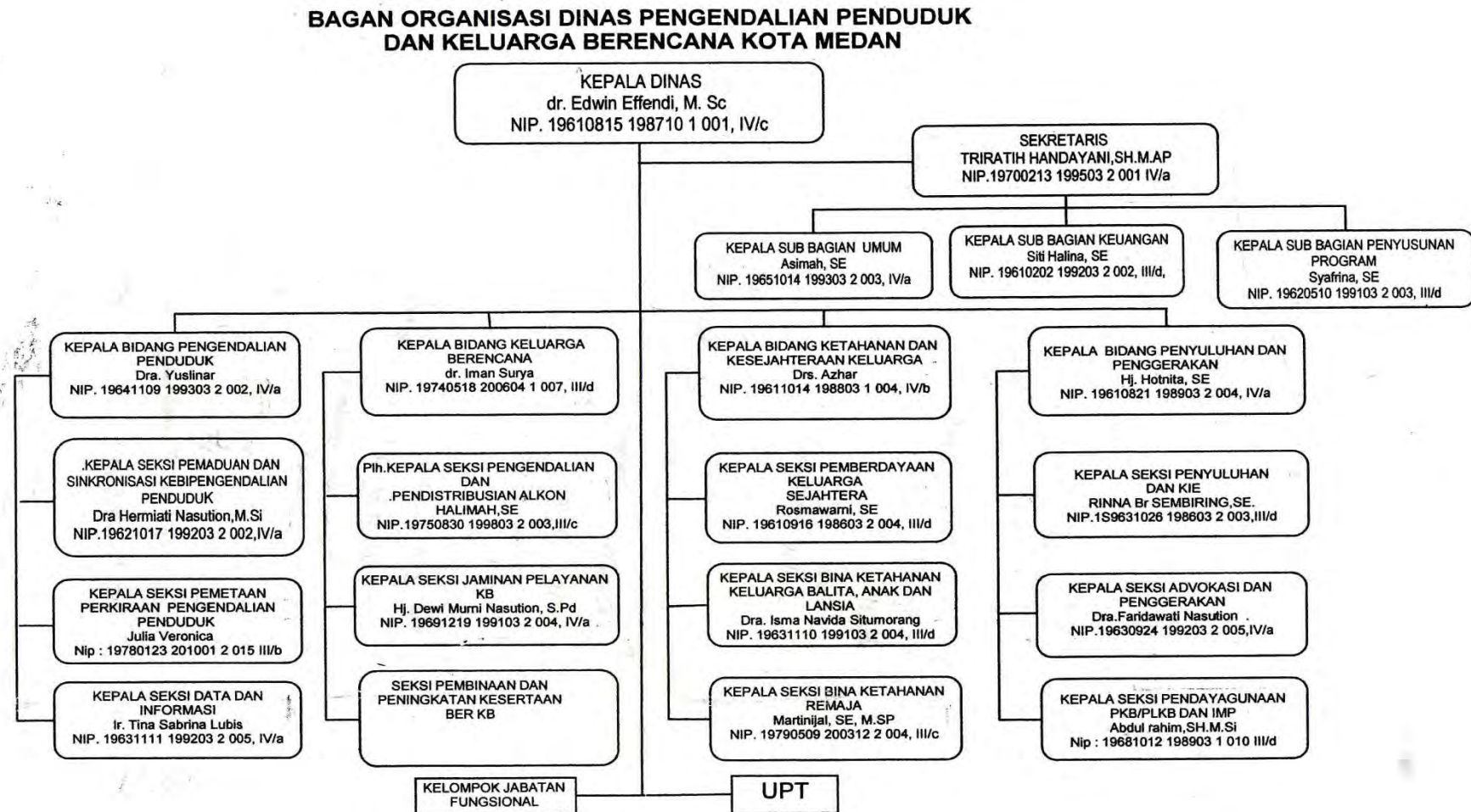
Tabel IV.4

Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	13
2.	Perempuan	40
Jumlah		53

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah pegawai di DP2KB Kota medan lebih besar perempuan, dimana pegawai laki-laki hanya sepertiga dari pegawai perempuan. Kesenjangan ini dikarenakan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh DP2KB serta kegiatan keluarga berencana tersebut lebih banyak berhubungan dengan perempuan

4.2.5 Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota Medan



4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kota Medan.

Pemerintah memiliki tugas yang sangat berat dalam mengatasi pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah membentuk suatu badan yang ditugaskan untuk mengatasi hal tersebut yaitu BKKBN dan sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2010, dalam melaksanakan arah kebijakan Nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga, pemerintah telah menetapkan strategi di mana BKKBN sebagai badan yang ditunjuk untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal pertumbuhan penduduk dalam Rekarnas Tahun 2011-2015 telah menetapkan kebijakannya yaitu : menyetarakan kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan KB, meneggerakan dan memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja serta masyarakat, menata kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, pegawai dan tenaga penyuluh, serta meningkatkan pembiayaan.

“Jadi sejalan dengan kebijakan Nasional, maka tiap-tiap daerah juga memiliki kebijakan sendiri dimana, kebijakan tersebut mengacu kepada kebijakan pusat. Untuk Kota Medan sendiri kita mempunyai DP2KB. Dimana organisasi pemerintah ini merupakan mitra BKKBN Provinsi dalam hal mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Medan. Kebijakan kependudukan yang utama saat ini adalah kebijakan keluarga berencana, maka DP2KB sebagai lembaga pemerintah yang menangani masalah keluarga berencana di daerah dalam menyusun program kerja di daerah, dalam hal ini Kota Medan harus berdasarkan perpaduan antara kebijakan Nasional dan kebijakan yang ada di daerah”. Wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak dr. Edwin Effendi pada 4 juni 2018)

Dalam suatu instansi tidak terkecuali DP2KB untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan, mereka membentuk berbagai bidang yang akan

menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dari pusat, dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah menentukan bidang-bidang yakni : sekretariat, bidang keluarga berencana, bidang penyuluhan dan pergerakan, bidang pengendalian penduduk, serta bidang ketahanan dan kesejahteraan. Setiap bidang yang ada di DP2KB Kota Medan diharapkan dapat mengatasi masalah pertumbuhan penduduk sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang tujuan dari tupoksinya adalah menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Jika dilihat dari rincian tugas pokok dan fungsi yang di miliki bidang keluarga berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk langsung terlibat aktif kepada masyarakat, dimana bidang KB tersebut menyusun program-program keluarga berencana guna mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan.

Fokus kinerja dari DP2KB Kota Medan sendiri adalah kepada perempuan dan anak dengan tujuan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat, dimana kesejahteraan itu akan tercapai apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan. Jika dilihat dari program kerja, bidang pengendalian penduduk dan KB bekerja sendiri-sendiri, dimana bidang KB lebih menekankan kepada pemasangan alat KB serta mempromosikan program KB, sedangkan bidang pengendalian penduduk lebih kepada menekan angka pertumbuhan penduduk.

DP2KB merupakan stakeholder dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Peranan DP2KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sangat diharapkan pemerintah. Sebelum membahas mengenai peranan

DP2KB Kota Medan mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka perlu kita lihat bagaimana keadaan penduduk di kota Medan.

Tabel IV.5

Jumlah Dan Rata-Rata Jiwa Per Keluarga Tahun 2013-2014-2015

Tahun pendataan	Jumlah		Rata-Rata Jiwa Per Keluarga
	Keluarga	Jiwa	
2013	433.633	2.065.185	4-5
2014	441.343	2.113.694	4-5
2015	448.953	2.150.057	4-5

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan setiap tahunnya, peningkatan jumlah penduduk tersebut juga diimbangi dengan peningkatan jumlah keluarga dari tahun ke tahun tetap. Rata-rata jiwa dalam keluarga lebih cenderung menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh keluarga dari pada menggambarkan kondisi tingkat fertilitas. Rata-rata jiwa perkeluarga dari tabel tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan program yang diharapkan pemerintah yakni setiap keluarga terdiri dari 4 orang.

Dalam pengendalian jumlah penduduk, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan meliputi peningkatan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan alat kontrasepsi, kerjasama baik dengan pihak pemerintah atau lembaga lain dan dengan pihak swasta.

4.3.2. Peningkatan Pembinaan Kesetaraan ber-KB Jalur Pemerintahan

a. Koordinasi, keterpaduan dan kemitraan dengan lembaga pemerintah dalam hal program KB.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan kerjasama yang baik, baik itu dengan masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan yang lainnya, demikian juga dengan DP2KB Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, maka DP2KB Kota Medan menetapkan kebijakan dengan menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah dan masyarakat.

“Bentuk kerjasama yang di jalanin DP2KB dengan lembaga lain adalah dalam hal koordinasi, keterpaduan dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan KB. Koordinasi dan keterpaduan ini dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan dan keselarasan bersama agar mempunyai daya ungkit yang luas kepada pelaksanaan gerakan keluarga berencana nasional dalam rangka responding program, maka fungsi koordinasi dan keterpaduan akan semakin penting. Koordinasi dan keterpaduan bersama dilakukan antara lain melalui forum rapat koordinasi pada setiap wilayah secara teratur, sehingga dapat saling tukar informasi bagi keterpaduan program yang dilakukan bersama”. (wawancara dengan Kabid Bidang KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak dr. Imam Surya pada 6 juni 2018).

“Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DP2KB, khususnya Bidang KB dalam menekan pertumbuhan penduduk Kota Medan adalah kegiatan PUP Smear gratis kepada perempuan yang sudah berkeluarga dengan dibantu oleh dinas kesehatan dan puskesmas. Disamping itu koordinasi juga dilakukan dengan dinas sosial yaitu memberikan bantuan KB kepada masyarakat kurang mampu. Dalam koordinasi dengan lembaga sosial, bidang KB meminta data tentang masyarakat yang kurang mampu, agar pemberian fasilitas KB gratis tepat sasaran. Koordinasi yang sama juga terjalin dengan Polres dalam kegiatan KB Bhayangkara”. (wawancara dengan Kasi Jaminan Pelayanan KB, Ibu Dewi Murni Nst pada 7 juni 2018).

Terselenggaranya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan jumlah aseptor 44,93% dari target, serta terlaksananya kegiatan PKK KB kesehatan dengan pencapaian 15,489 aseptor atau 66,97% dari target. Jika dilihat dari target yang dicapai DP2KB dalam upaya Koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, hasil yang di dapatkan jauh dari apa yang di harapkan. Jika dilihat dari segi kelembagaan.

“kesulitan menentukan jadwal menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut. Kesulitan menentukan jadwal tersebut karena setiap lembaga pemerintah mempunyai tupoksi dan kegiatan masing-masing lembaga atupun dinas. Tidak tercapainya target tersebut juga diakibatkan sulitnya koordinasi dengan masyarakat. koordinasi dengan masyarakat merupakan hal yang paling sulit dilakukan karena melibatkan banyak individu dengan sikap yang berbeda-beda. Respon dari setiap masyarakat kepada setiap kebijakan yang ada berbeda-beda, hal ini disebabkan perbedaan pandangan dalam masyarakat, kebiasaan yang tertanam dalam masyarakat maupun tingkat pendidikan masyarakat”. (wawancara dengan Kabid Bidang KB Bapak dr. Imam Surya pada 6 juni 2018)

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu kebijakan yang ditetapkan DP2KB Kota Medan dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk adalah dengan melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan. Kegiatan koordinasi dalam kebijakan ini dilakukan dengan melibatkan peran serta lembaga pemerintah lainnya. Berdasarkan data dari DP2KB ditemukan bahwa pencapaian yang diraih dengan melibatkan lembaga pemerintah lain masih jauh di bawah target yang diharapkan. Pencapaian target yang tidak memuaskan tersebut diakibatkan sulitnya menyesuaikan jadwal dengan lembaga pemerintah lain serta kurangnya peran aktif masyarakat.

b.Sosialisasi Kegiatan KB Kepada Masyarakat.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat harus disosialisasikan kepada masyarakat, program-program yang ditetapkan oleh DP2KB Kota Medan seperti yang telah ditetapkan dalam tupoksi bab sebelumnya harus di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat. Dalam proses sosialisasi itu sendiri melibatkan peran aktif pemerintah. Hal ini senada dengan tanggapan yang diberikan oleh Kasubag penyusunan program.

“sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat dengan melibatkan organisasi masyarakat maupun pemerintah. Saat ini DP2KB Kota Medan sedang melakukan penyuluhan KB tidak hanya pada perempuan, namun juga kepada pria dengan semboyan “Perempuan ber-KB Sudah Biasa, Laki-laki ber-KB Luar Biasa” program KB untuk pria sudah sejak lama ada, namun untuk Kota Medan sendiri sosialisasi yang dilakukan mulai gencar sejak tahun 2010”.(wawancara dengan Ibu Syafriana, SE. Kasubag Penyusunan Program pada 8 juni 2018)

“Selain sosialisasi langsung kepada masyarakat juga dikenal adanya sosialisasi satu arah, dimana sosialisasi satu arah tersebut dilakukan melalui iklan-iklan KB dengan spanduk atau melalui iklan di radio. kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh pemerintah Kota Medan”.(wawancara dengan Ibu Ir. Tina Sabrina, Kasi Data dan Informasi pada 11 juni 2018)

“Jadi adapun manfaat yang didapat dari sosialisasi itu sendiri yaitu dari tahun ketahun masyarakat yang menggunakan KB semakin meningkat, dan juga semakin lama pengetahuan masyarakat akan program KB semakin meningkat”.(wawancara dengan Ibu Ir. Tina Sabrina pada 11 juni 2018)

Ketika melakukan wawancara dengan masyarakat berdasarkan observasi penulis, terlihat bahwa yang mengerti akan program KB adalah masyarakat yang

usianya di bawah 40 tahun, sementara untuk usia 40 tahun ke atas kurang memahami program KB itu sendiri.

Setiap kebijakan yang sudah di sosialisasikan tidak terkecuali kebijakan KB yang telah dikeluarkan bidang keluarga berencana dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk mendapat respon yang berbeda-beda dari setiap masyarakat. Faktor etnis atau suku yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan sosialisasi keluarga berencana tersebut. Hal ini terlihat dari seorang penduduk yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga di Medan Marelan dengan mempunyai 5 orang anak.

“Saya memang tidak mengikuti KB karena dalam masyarakat batak kami melihat garis keturunan itu dari anak laki-laki. Jadi walaupun anak saya sekarang sudah 5 orang saya masih tetap menginginkan anak laki-laki” (wawancara dengan salah seorang warga Medan Marelan, Ibu Sirait pada 4 juli 2018).

karena budaya patrilinear yang melekat dalam masyarakat batak yang mengambil garis keturunan dari laki-laki, sehingga beliau saat itu sudah mempunyai 5 orang anak perempuan masih tidak mau mengikuti program KB

Selain faktor budaya yang melekat di masyarakat, adapun tanggapan lain yang diberikan masyarakat dalam hal sosialisasi KB.

“kalau menurut saya program KB itu memang tidak bermanfaat ya, karena anak itu kan rezeki jadi ya memang harus di syukuri. Untuk apa kita menahan nahan kalau ingin punya anak. Seberapa dikasih tuhan aja ya harus di terima. Masih banyak diluar sana yang mau punya anak. Kita yang bisa dikasih sanak ya ngapain di tahan tahan kan” (wawancara dengan Ibu Farida salah seorang warga Medan Deli pada 7 juli 2018).

Jadi, menurut Ibu Farida yang mengecam pendidikan hanya sampai pada SMP dan memiliki 4 orang anak, bahwa kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan

KB itu sendiri tidak bermanfaat, karena menurut beliau anak merupakan rezeki dan harus di syukuri.

Dalam sosialisasi kegiatan KB di masyarakat, ada juga masyarakat yang memberikan tanggapan yang positif.

“kalau dalam pandangan saya, program KB itu memang penting, kalau jaman dulu banyak anak masih banyak lahan yang mau di olah, misalnya kita bisa bertani untuk kasih makan anak. Sedangkan sekarang lahan sudah semakin sempit karena penduduk yang semakin meningkat, jadi kalau tidak dibatasi yah bisa tambah meningkat lagi jumlah penduduk di medan, sedangkan lapangan kerja susah dan juga pendidikan yang semakin mahal” . (wawancara dengan Ibu Halimah pada 7 juli 2018).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh DP2KB Kota Medan yang ditujukan kepada masyarakat telah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat maupun lembaga pemerintah, hal ini terbukti melalui sosialisasi tersebut peran serta masyarakat ber KB sendiri meningkat, namun jika dilihat dari sisi masyarakat, banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh DP2KB. Hal ini tidak terlepas dari persepsi atau pandangan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya kehidupan yang patrilinear/budaya yang ada di masyarakat dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Kegiatan yang dilakukan tersebut didukung oleh beberapa foto kegiatan yang dilakukan oleh DP2KB Kota Medan.



Gambar V.1 kegiatan konseling KB di puskesmas Medan Deli pada April 2016



Gambar V.2 kegiatan sosialisasi pemasangan alat kontrasepsi di puskesmas
Medan Marelan Pada Agustus 2015



Gambar V.3 penyerahan bantuan alat kontrasepsi untuk masyarakat yang kurang
mampu.

c. Pelatihan dan Diklat dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

DP2KB Kota Medan menyadari bahwa ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring perkembangan jaman, sebagai lembaga pemerintahan yang mengabdikan kepada masyarakat, DP2KB Kota Medan harus selalu melakukan pembenahan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Upaya yang dilakukan DP2KB Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan cara meningkatkan kualitas SDM, peningkatan kualitas SDM itu sendiri dilakukan melalui kegiatan orientasi, konsultasi, refreshing, rapat-rapat dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Utara maupun pusat.

“Dalam kegiatan ini Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan selalu mengupayakan agar pegawai yang berkopentent dapat mengikuti kegiatan ini. Jadi dengan demikian hasil dari pelatihan atau orientasi yang telah diberikan nantinya dapat diteruskan kepada pegawai lainnya” (wawancara dengan Ibu Asimah SE, Kasubag Umum pada 28 juni 2018).

Selain itu beliau juga mengatakan

“peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui pendidikan dan latihan, kursus, pendidikan berjenjang atau kesempatan lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Dalam hubungan ini, berbagai kegiatan perlu diarahkan agar dapat memberikan peluang yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, namun dalam peningkatan tersebut perlu di perhitungkan juga beban kerja para pengelola program khususnya tenaga lapangan agar semua misi yang diemban dapat dikerjakan dengan penuh semangat, efektif dan efisien. Dari sini dapat kita lihat bahwa fungsi yang harus di jalankan DP2KB diantaranya : perumusan kebijakan teknis dibidang penggerakan masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penggerakan masyarakat”. (wawancara dengan Ibu Asimah SE, Kasubag Umum pada 28 juni 2018).

d.Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Infrastruktur maupun jasa.

Sebagai lembaga pemerintah, DP2KB Kota Medan juga menyadari, selain menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik swasta maupun pemerintah, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia maka hal yang paling penting adalah diperlukan juga pembenahan. Dalam hal ini, DP2KB melakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar mutu yang baku oleh tenaga profesional. Dinamika Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) yang semakin berkembang menuntut adanya peningkatan mutu dan profesionalisme dalam pengelolaannya sejalan dengan kemajuan iptek yang ada. Salah satu tujuan meningkatkan profesionalisme tenaga ini adalah dalam upaya mengembangkan desentralisasi manajemen yang menghendaki pengelolaan yang lebih mampu dan mandiri.

Ada beberapa langkah yang dilakukan DP2KB Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Medan.

1. Pelayanan Konseling KB

Salah satu kebijakan yang dilakukan DP2KB Kota Medan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah dengan melakukan pelayanan konseling KB.

“Pelayanan konseling dalam hal KB sangat penting, karena masih ada beberapa masyarakat yang malu – malu untuk mengatakan masalahnya secara terbuka. Jadi dengan adanya pelayanan khusus, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi merasa malu untuk mengatakan permasalahannya khususnya masalah alat – alat kontrasepsi yang aman dan baik untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung program pelayanan konseling KB tersebut, DP2KB Kota Medan melakukan pelayanan konseling melalui puskesmas dan rumah sakit pemerintah serta

dibentuknya tim KB Keliling”. (wawancara dengan Kepala DP2KB dr. Edwin Effendi pada 27 juni 2018).

Berdasarkan hasil observasi, kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal konseling tersebut sangat efektif dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk kota Medan. Melalui konseling KB tersebut maka, jumlah masyarakat pengguna KB dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel IV.6

Perkembangan Tingkat Kesertaan ber-KB Dari Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah		Persentase Peserta Kb Terhadap PUS
	Peserta KB	PUS	
2011	196.569	313.400	62,72
2012	202.490	319.004	63,47
2013	209.292	325.511	64,29
2014	210.252	326.122	64,47
2015	225.672	329.110	68,57

Keterangan PUS = Pasangan Usia Subur

Dari data diatas kita melihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kesertaan ber KB di masyarakat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa konseling KB yang diberikan kepada masyarakat semakin lama semakin dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat semakin menyadari pentingnya ber KB demi mewujudkan keluarga yang sejahtera.

2. Pengelolaan Jasa Pelayanan/pemasangan Alat Kontrasepsi

Peningkatan kualitas SDM yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terlihat secara langsung pada saat pemasangan alat kontrasepsi. Setelah melakukan sosialisasi mengenai apakah alat kontrasepsi tersebut, maka dilakukan juga pemasangan langsung alat kontrasepsi kepada masyarakat. Dalam pemasangan alat kontrasepsi kepada masyarakat dilapangan maka akan ditemukan repon yang berbeda-beda.

“Masyarakat yang ekonominya rendah dan tingkat pendidikan lebih sulit diberi pemahaman tentang pemasangan alat kontrasepsi. Masyarakat yang pendidikannya rendah tersebut sering menganggap bahwa ini merupakan proyek pemerintah, dimana yang diuntungkan dari kegiatan tersebut adalah pemerintah. Namun pada kenyataannya, kegunaan KB tersebut justru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu tersebut”. (wawancara dengan Ibu Yanthi PLKB Medan Deli pada 28 juni 2018).

Tabel IV.7

Banyaknya Akseptor KB Menurut Alat Yang Digunakan

Tahun	Alat yang digunakan					Jumlah
	PIL	IUD	KONDOM	SUNTIK	LAINNYA	
2011	65.542	29.097	9.062	66.382	26.486	196.569
2012	66.300	29.786	10.352	67.802	28.250	202.490
2013	67.825	32.251	12.526	67.852	28.838	209.292
2014	67.925	32.526	12.927	68.025	28.849	210.252
2015	69.012	31.927	15.125	70.232	39.326	225.672

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat kesertaan masyarakat dalam ber KB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jika dilihat dari alat KB yang digunakan, masyarakat lebih banyak memilih menggunakan pil KB dan Suntik, hal

ini disebabkan oleh keamanan dalam penggunaan alat tersebut. Di samping itu, penggunaan pil KB dan suntik tersebut tidak menghalangi hubungan keharmonisan dalam keluarga. Sejak tahun 2011, DP2KB kota Medan mulai gencar melakukan penyeteraan dalam hal ber KB. Dengan slogan “*Perempuan ber KB sudah biasa, laki-laki KB Luar Biasa*”, dimana pria juga berpartisipasi aktif dalam mengikuti program KB. Namun pada kenyataannya masyarakat yang melakukan KB tersebut adalah perempuan, dimana 90% pengguna KB itu sendiri adalah perempuan. Dari data diatas juga terlihat jelas bahwa suntik, IUD serta pil merupakan pilihan terbanyak yang dilakukan masyarakat dalam ber KB dimana alat kontrasepsi tersebut ditujukan kepada perempuan. Kegiatan KB untuk pria itu sendiri sudah ada yakni dengan pemakaian kondom, obat, ultrasonografi serta vasektomi. Masyarakat pada umumnya tidak terlalu tertarik menggunakan kondom karena kepuasan yang diperoleh kurang, sedangkan pil KB untuk pria merupakan PIL yang berhasil untuk mengurangi kecepatan sperma sehingga proses pembuahan dapat dikendalikan, namun peredaran pil tersebut masih terbatas serta harga nya sangat mahal. Sementara itu, Ultrasonografi juga berguna untuk memperlambat pergerakan sperma namun efek samping yang ditimbulkan adalah dapat mengakibatkan impotensi.

“Satu-satu nya kegiatan KB yang familiar di masyarakat adalah Vasektomi namun vasektomi ini dilakukan jika benar-benar sudah tidak ingin mempunyai keturunan lagi”. (wawancara dengan Ibu Yuslinar Bidang Pengendalian Penduduk).

Dari penjelasan mengenai kegiatan KB untuk pria tersebut, maka penulis menyimpulkan sulitnya mendapatkan fasilitas KB serta efek samping yang sangat berbahaya untuk pria mengakibatkan kurangnya peran serta pria dalam melakukan kegiatan KB. Untuk mencapai kesetaraan dalam ber KB, DP2KB Kota Medan terus berupaya melakukan sosialisasi serta mengajak pria dalam ber KB. Satu-satunya kegiatan KB yang aman untuk pria serta mudah untuk dijangkau oleh masyarakat adalah vasektomi.

Berdasarkan observasi penulis, ditemukan selain karena faktor migrasi, pertumbuhan penduduk juga diakibatkan karena sebagian besar masyarakat memasang atau menggunakan alat kontrasepsi setelah mempunyai anak 3 orang atau lebih, sedangkan konsep KB itu sendiri menurut BKKBN adalah 2 anak saja. Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pemasangan alat kontrasepsi, DP2KB Kota Medan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dimana lembaga pemerintah tersebut telah menyediakan fasilitas pelayanan KB gratis kepada masyarakat. Dalam hal anggaran dan biaya juga digunakan sepenuhnya untuk pemenuhan alat dan kebutuhan ber KB, namun kegiatan tersebut tidak mampu mencapai target yang diharapkan karena masyarakat yang menerima tidak melakukannya sesuai dengan harapan DP2KB Kota Medan yakni cukup 2 anak saja. DP2KB Kota Medan tidak dapat memaksakan masyarakat untuk melakukan program KB tersebut karena setiap masyarakat mempunyai hak asasi masing-masing.

3. Pelayanan dan Penanggulangan *Side Effect* Pasca Pemasangan Alat

Kontrasepsi Setiap kegiatan yang dilakukan akan memiliki dampak negatif dan positif, demikian juga dengan pemasangan alat kontrasepsi. Oleh karena itu

demikian kenyamanan masyarakat setelah menggunakan alat kontrasepsi, pemerintah juga terus memantaunya dan ini sudah dilakukan DP2KB di Kota Medan dengan adanya pelayanan dan sosialisasi awal kepada masyarakat tentang efek yang dapat timbul setelah menggunakan alat ini sehingga masyarakat sudah siap menerima resiko yang ada. Apabila pemasangan alat kontrasepsi terhadap masyarakat mengalami kontraindikasi maka DP2KB Kota Medan sudah siap untuk menyediakan pelayanan untuk menangani masalah tersebut.

“Pada umumnya kegagalan pada saat pemasangan alat kontrasepsi sangat kecil kemungkinannya, dari 100 masyarakat yang menggunakan KB paling banyak 3 orang yang mengalami kegagalan bahkan tidak ada sama sekali. Hal tersebut masih angka yang wajar, karena sebelum diadakannya pemasangan alat kontrasepsi, maka dilakukan dulu sosialisasi sehingga masyarakat tahu apa itu program keluarga berencana, kemudian adanya konseling untuk mengetahui program KB apa yang cocok baru dilaksanakan program KB”. (wawancara dengan Ibu Sumiati PLKB Kota Medan).

4.3.3 Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber KB Jalur

Swasta.

a. Sosialisasi

Dalam kegiatan yang dilakukan DP2KB Kota Medan, tidak terlepas dari bantuan pihak swasta. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan DP2KB Kota Medan juga melibatkan pihak swasta, dimana dalam rencana strategis DP2KB Kota Medan tahun 2010-2017 adanya penyuluhan yang dilakukan DP2KB Kota Medan melalui radio. Kegiatan penyuluhan melalui radio ini merupakan kegiatan rutin yang selalu ada setiap tahunnya. Berdasarkan LAKIP DP2KB Kota Medan tahun 2016 didapatkan bahwa terlaksananya operasional KIE melalui radio dengan biaya untuk tahun 2016 yakni Rp. 30.000.000,- per tahun.

“Hubungan kerjasama yang dilakukan dengan Radio dalam rangka sosialisasi alat kontrasepsi dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh DP2KB. Selain menjalin kerjasama dengan radio, bentuk kerjasama yang dilakukan DP2KB Kota Medan adalah menjalin kerjasama dengan pihak swasta lain, yakni dengan media cetak. Kegiatan sosialisasi dengan pihak swasta ini dilakukan apabila ada program yang akan dilaksanakan oleh DP2KB melibatkan masyarakat yang banyak. Selain dalam pelaksanaan kegiatan, promosi-promosi serta iklan ajakan untuk melakukan KB juga dilakukan”. (wawancara dengan Bapak Abdul Rahim, SH. M.Si Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB/dan IMP).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa DP2KB Kota Medan selain terjun langsung kepada masyarakat, DP2KB kota Medan juga melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak swasta, adapun sosialisasi yang mereka lakukan melalui swasta adalah dengan memasang iklan mengenai kegiatan yang akan dilakukan serta melakukan sosialisasi melalui radio-radio swasta. Kerja sama yang terjalin antara DP2KB Kota Medan dengan pemerintah dalam hal KB terbilang baik, karena kegiatan tersebut termasuk kegiatan rutin yang terus dilakukan.

b. Pengelolaan Jasa pemasangan/penyediaan Alat Kontrasepsi

Proses pengendalian jumlah penduduk merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dimana semua lapisan masyarakat harus secara rata menikmati fasilitas serta mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan informasi. Keterbatasan tenaga medis kesehatan oleh pemerintah mengakibatkan lembaga pemerintah dalam hal ini DP2KB Kota Medan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Para peserta KB lebih banyak memilih berKB melalui jalur swasta, Masyarakat lebih banyak yang melakukan KB melalui jalur swasta karena berdasarkan observasi penulis, sebagian besar masyarakat yang melakukan KB tersebut berasal dari masyarakat yang

ekonominya menengah ke atas. Alasan masyarakat memilih ber KB melalui jalur swasta karena masyarakat berpendapat bahwa fasilitas yang didapat dari swasta itu lebih baik.

“sebagai Pegawai Negeri Sipil, saya memang mendapatkan asuransi kesehatan, namun saya lebih percaya kepada pihak swasta meskipun biaya di swasta lebih mahal”.(Wawancara dengan Ibu Fitri salah seorang warga Medan Deli).

“Dalam proses penyelenggaraan keluarga berencana demi mengendalikan jumlah penduduk yang ada di kota Medan DP2KB mengakui adanya campur tangan pihak swasta. Pihak swasta khususnya rumah sakit swasta yang ada di kota Medan sangat membantu dalam mengendalikan jumlah penduduk di Kota Medan”. (wawancara dengan Ibu Berliana Staf DP2KB Kota Medan).

Dari pernyataan dan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat lebih banyak memilih kegiatan ber KB melalui jalur swasta, hal ini dikarenakan masyarakat yang melakukan KB pada umumnya adalah masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Rumah sakit pemerintah memang sudah menyediakan KB gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, namun masyarakat menganggap bahwa fasilitas yang diberikan oleh swasta lebih baik.

4.3.4 Hambatan- hambatan Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk Kota Medan

Setiap kebijakan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah atau pun organisasi lain selalu mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut sering menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan dalam pengendalian jumlah

penduduk untuk kota Medan sendiri mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh DP2KB Kota Medan dalam menekan pertumbuhan penduduk di Kota Medan berasal dari faktor internal dari dalam diri DP2KB itu sendiri dan faktor eksternal dari luar DP2KB itu sendiri dalam haldari masyarakat. Adapun hambatan-hambatan yang dialami BPPKB adalah:

1. Faktor Internal yakni Faktor Penghambat dari BPPKB KotaMedan

a. Kurangnya Tenaga Teknis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki Kader di setiap kecamatan maupun kelurahan dimana setiap kader tersebut diwajibkan melakukan koordinasi dengan DP2KB Kota Medan. Namun, luasnya ruang lingkup yang ada dimana kota Medan terdiri atas 21 Kecamatan menjadikan pemerintah megalami kesulitan mengingat tenaga teknis yang ada sangat terbatas. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana saat ini adalah sekitar 123 orang untuk 21 kecamatan. Menurut kepala Staf Subbag Umum, pemerintah harus menambah tenaga petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), mengingat luas nya kota Medan.

“Untuk kegiatan KB itu sendiri setidaknya diperlukan 7 tenaga penyuluh Lapangan Keluarga Berencana disetiap kecamatan. Namun, jika PLKB ditambah, maka jumlah anggaran pun akan bertambah. Penambahan jumlah PLKB tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa DP2KB berperan tidak hanya ebagai pemantau atau penyidik, namun juga pelaksana teknis”. (wawancara dengan Ibu Asimah SE).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekurangan tenaga yang ahli di dalam DP2KB kota Medan menjadi kendala dalam menghambat pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan DP2KB Kota Medan guna

mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut, diantaranya dengan memberikan uang intensif/uang operasional untuk mendukung tugas kader di lapangan, namun usaha tersebut belum memaksimalkan kinerja DP2KB Kota Medan karena yang mereka butuhkan adalah penambahan pegawai.

b. Infrastruktur yang Belum Memadai

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka DP2KB Kota Medan memerlukan infrastruktur guna membantu DP2KB Kota Medan dalam bekerja, baik yang digunakan kepada masyarakat maupun yang digunakan oleh DP2KB itu sendiri untuk keperluan kedinasan. Pada saat ini DP2KB Kota Medan telah memiliki 2 mobil penyuluhan serta 5 motor untuk bekerja, di samping itu DP2KB Kota Medan juga memiliki beberapa peralatan kesehatan, namun belum memadai. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada DP2KB membutuhkan sarana maupun prasarana yang memadai sehingga program kerja dapat dilakukan secara maksimal.

“Saat ini di DP2KB Kota Medan telah memiliki mobil penyuluhan, motor maupun alat-alat medis. Namun jumlahnya tidak memadai, sehingga diadakan sistem sosialisasi, penyuluhan dan pemasangan alat kontrasepsi secara bergilir, hal ini akan memperlambat DP2KB Kota Medan dalam bekerja”. (wawancara dengan Ibu Tritatih Handayani, SE Sekretaris DP2KB).

Salah satu masyarakat Medan Deli ibu Nancy seakan membenarkan pernyataan dari Ibu Tritatih tersebut, beliau menyebutkan bahwa pernah ada penyuluhan program KB di daerah ini, namun itu hanya dilakukan sesekali saja.

“Saya sendiri memang pernah mengikuti penyuluhan mengenai KB pada dua bulan yang lalu, namun sampai saat ini kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi. Saya sangat tertarik dengan kegiatan ber KB meskipun anak saya masih satu orang, saya ingin membahagiakan anak-anak, buat apa punya banyak anak tapi tidak bisa dinafkahi malah kita jadi berdosa. Tapi saya bingung mau bertanya kepada siapa. Dipuskesmas memang bisa, tapi sekedar konseling gitu kan tidak enak, harus bayar lagi. Katanya sih ada

KB keliling, tapi saya bingung dimana. Saya sih berharap adanya kegiatan rutin dilakukan di sini, jadi tahu meluangkan waktu”. (Wawancara dengan Ibu Nancy)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak hanya tenaga teknis yang sering menghambat DP2KB Kota Medan dalam bekerja, keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala yang dialami DP2KB kota Medan dalam bekerja. Untuk masalah kurangnya infrastruktur tersebut, memang sudah diberikan usulan kepada Pemko Medan untuk penambahan infrastuktur di DP2KB Kota Medan, namun sampai saat ini belum ada respon maupun tanggapan terkait infrastruktur tersebut.

2. Faktor Internal, yakni Hambatan-Hambatan yang Datang dari Masyarakat.

a. Pernikahan yang Dilakukan Pada Usia yang Masih Muda(Pernikahan Usia Dini)

Menurut pandangan beberapa kalangan, pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dilakukan, sehingga sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan kita harus memikirkannya secara matang dan baik sehingga dapat terskema dengan baik. Dalam mengatur pernikahan itu sendiri pemerintah pusat juga menetapkan peraturan mengenai masalah pernikahan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)tahun.”

Undang-undang pernikahan tersebut diatas dapat memicu terjadinya pernikahan diusia yang boleh dikatakan remaja. Usia 16 tahun itu masih termasuk usia yang

remaja, sehingga usia pernikahan yang disebutkan oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan keinginan Badan Keluarga Berencana. Pada umur yang masih 16 tahun secara psikologi seseorang itu belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, BKB mengharapkan usia perkawinan yang ideal adalah umur 25 tahun bagi pria dan umur 21 tahun. Peraturan pemerintah mengenai usia pernikahan (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) sangat beresiko tinggi untuk menambah jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam lingkungan keluarga prasejahtera, kelompok umur ini dinilai sangat rentan melakukan pernikahan usia dini. Kerentanan dalam melakukan pernikahan dini tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan juga peran aktif dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat.

“Usia 16 tahun memang masih usia pelajar, belum mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar”.(wawancara dengan Bapak Imam Surya, Kepala Bidang KB).

Selain itu yang memicu pernikahan di usia muda adalah karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Mereka masih belum menyadari peran dan tanggung jawab yang akan mereka pikul saat berumah tangga nanti. Campur tangan orang tua dalam urusan pernikahan anak juga dapat menimbulkan terjadinya pernikahan yang sangat cepat. Orang tua terkadang ingin cepat menikahkan anaknya karena ingin cepat-cepat mendapatkan keturunan. Untuk kawasan pemukiman kumuh seperti daerah pinggiran rel kereta api permasalahan

pernikahan usia dini juga mengalami masalah yang sama yakni masih rendahnya kualitas ekonomi dan kesenjangan pendidikan merupakan hal memicu terjadinya pernikahan di usia muda. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung cepat menikah.

“Memang pemukiman kumuh dan daerah rel kereta api seharusnya menjadi fokus perhatian kita, namun pada kenyataannya lokasi penyuluhan untuk daerah kumuh dan rel kereta api sangat sulit untuk dijangkau, karena akses menuju daerah tersebut masih sangat buruk, selain itu juga masyarakat yang ada di daerah tersebut, walaupun sudah diberi penyuluhan mereka sulit menerima” (wawancara dengan Bapak Imam Surya, Kepala Bidang KB).

Masyarakat Medan Deli Ningsih (20 tahun) yang telah memiliki 1 anak mengatakan bahwa beliau mengancam bangku sekolah hanya sampai SMP saja, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang selama ini dia tekuni hanyalah sebagai buruh cuci dengan penghasilan Rp. 300.000,- per bulannya. Penghasilan yang didapat tersebut masih sangat minim, sehingga menimbulkan pandangan dari pada jadi beban tanggungan orang tua lebih baik menikah.

“saya memang menikah di usia yang sangat muda. Itu karena saya berpikir daripada saya jadi beban orang tua saya ya lebih baik saya menikah saja. Itupun setelah menikah saya memang masih bekerja juga membantu ekonomi keluarga. (Wawancara dengan Ibu Ningsih).

Selain itu, Ibu Fitri Nasution (20 tahun) salah satu masyarakat yang menikah muda menyebutkan alasannya menikah muda karena saran dari orang tua untuk segera menikah. Hal ini disebabkan oleh jarak usia dengan pasangannya 10 tahun. Beliau mengaku kalau orang tua beliau juga dulu melakukan hal yang sama. Meskipun saat ini beliau sudah menjadi istri, beliau mengaku masih terus melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas swasta di Medan.

“awalnya sih saya belum mau menikah, karena mengingat usia saya yang masih sangat muda. Tapi orang tua saya memaksa saya untuk segera

menikah, karna usia saya dan pasangan saya yah memang cukup jauh. Tapi walaupun begitu saya tetap kuliah, dan suami saya mengizinkan saya untuk tetap melanjutkan pendidikan” (Wawancara dengan Ibu Fitri).

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu faktor eksternal pertumbuhan penduduk di kota Medan adalah pernikahan dini di masyarakat. Menurut DP2KB kota Medan, pernikahan di usia muda harus bisa dikontrol karena selain memicu pertumbuhan penduduk, menikah usia muda juga dari segi kesehatan memang tidak baik. Namun undang-undang pernikahan sendiri tidak sejalan dengan harapan DP2KB Kota Medan, sehingga sulit bagi DP2KB Kota Medan untuk mengontrol dan mengendalikan jumlah penduduk di Kota Medan. Sejalan dengan undang-undang pernikahan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, pandangan masyarakat dalam menikah muda juga jadi faktor penghambat yang dialami DP2KB Kota Medan dalam mengendalikan jumlah penduduk.

b. Minimnya Pemanfaatan Program Pemerintah

Masalah lain yang timbul dimasyarakat pada umumnya yang dapat memicu peningkatan jumlah penduduk adalah minimnya pemanfaatan program pemerintah, dan salah satu programnya yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini berbanding terbalik dari program Badan Keluarga Berencana Yaitu “Dua Anak Lebih Baik”. Adanya perbedaan tingkat pola pikir masyarakat mengenai alat kontrasepsi menjadi pemicu utama, misalnya; Kurang pahamnya masyarakat tertentu tentang alat kontrasepsi, kurang mengetahui kegunaan alat kontrasepsi, ketakutan untuk menggunakan alat kontrasepsi serta kesadaran masyarakat masih kurang terhadap ledakan penduduk.

“Meskipun fasilitas yang dimiliki oleh DP2KB Kota Medan masih kurang memadai, namun fasilitas tersebut sudah dimaksimalkan

diberikan kepada masyarakat. Seperti misalnya pembagian kondom gratis dan pemasangan IUD gratis kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan bahkan memakai fasilitas tersebut”. (wawancara dengan Bapak Imam Surya, Kepala Bidang KB).

Ibu Wati salah satu masyarakat yang tidak menggunakan KB ketika ditanya kenapa beliau tidak menggunakan KB sementara pemerintah sudah menyediakan fasilitas KB gratis kepada masyarakat, beliau mengatakan bahwa beliau tidak tertarik untuk mengikuti program KB, karena takut menggunakan KB. Menurut informasi yang didengar KB itu akan menimbulkan efek samping kepada yang menggunakannya. Selain itu ketidakpuasan dalam melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan alat kontrasepsi mengakibatkan beliau tidak mau menggunakan alat kontrasepsi.

“alasan saya tidak menggunakan program KB karena saya memang takut. Karena sudah banyak cerita dari teman saya kalau menggunakan KB itu banyak juga dampak negatifnya. Maka dari itu saya sangat takut kalau ada terjadi apa apa di kemudian hari” (wawancara dengan Ibu Wati)

Di samping itu, pandangan masyarakat tentang fasilitas yang diberikan pemerintah dimana pemerintah apabila menyediakan fasilitas gratis maka pelayanannya kurang baik juga memicu ibu tersebut untuk tidak melakukan program KB. Berdasarkan pemaparan yang diatas dapat disimpulkan bahwa DP2KB Kota Medan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk sudah menyediakan fasilitas yang baik. Namun, peran serta aktif masyarakat masih kurang dalam mendukung kebijakan tersebut. Hal ini terbukti, dimana target yang ditetapkan oleh DP2KB kota Medan tersebut belum tercapai dengan baik. Kurangnya peran aktif masyarakat ditimbulkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, wawasan serta kurangnya kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah menimbulkan isu-isu yang bias di masyarakat. Hal ini lah yang menyebabkan sulitnya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bagian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan tentang Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Medan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. DP2KB Kota Medan dalam pengendalian jumlah penduduk kota Medan melibatkan peran aktif masyarakat serta melakukan kerjasama yang baik, baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Setiap kebijakan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana dalam upaya pengendalian jumlah penduduk disampaikan langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah maupun swasta baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Medan terdiri atas hambatan Intern yakni hambatan yang berasal dari dalam DP2KB Kota Medan dan hambatan ekstern yakni hambatan yang berasal dari luar DP2KB Kota Medan yakni masyarakat. Hambatan yang berasal dari DP2KB itu sendiri yakni kurangnya tenaga teknis dan infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan hambatan yang berasal dari masyarakat meliputi pernikahan usia dini di masyarakat, kurangnya

pemanfaatan program pemerintah oleh masyarakat dan tingginya angka kelahiran.

3. Semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana. Namun pada pelaksanaannya masih ada masyarakat yang tidak mau berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana walaupun masyarakat sudah mengetahui adanya kegiatan tersebut.

5.2 Saran

Setelah melihat peranan DP2KB Kota Medan khususnya bidang Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk kota Medan, maka beberapa saran yang dianggap penulis perlu menjadi bahan pertimbangan:

1. Perlu dilakukan penambahan tenaga teknis khususnya tenaga teknis dilapangan sehingga koordinasi dapat terjalin dengan baik, baik antara lembaga pemerintah maupun masyarakat. Apabila tenaga teknis ditambah maka proses pengendalian penduduk akan semakin meningkat, proses sosialisasi pun akan semakin baik, sehingga masyarakat akan semakin banyak yang mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana.
2. Perlunya memperhatikan kualitas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan Bidang Keluarga Berencana. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan apakah fasilitas tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Perlunya mendata kembali jumlah penduduk kota Medan yang mengikuti program keluarga berencana serta mendata ulang jumlah penduduk, berapa penduduk tetap, berapa migran dan berapa jumlah kelahiran sehingga proses pengendalian dapat sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adiningsih Sri. 2008, *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia*. Pusat Studi Asia Pasifik. PSAP UGM
- A Bashori Hakim. 2004, *Memelihara Harmoni Dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Penerbit : Kementerian Agama RI Jakarta
- Faqih Achmad. 2010, *Kependudukan, Teori, Fakta dan Masalah*. Penerbit Dee Publish, Yogyakarta
- Faturochman dkk. 2004, *Dinamika Kependudukan dan kebijakan*. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
- Juju, Mariati, Kun dan Suryawati, 2001. *Sosiologi*, Penerbit: Erlangga Jakarta
- Karyana Yayat dkk, 2017. *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*, Perpustakaan Nasional RI: Terbitan (KDT)
- Lembaga Demografi, 2007. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta : FEUI
- Mulyadi, 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Penerbit : Salemba Empat Jakarta
- Maudy Warrow dan Purwaningsih, 2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Poerwadarmito, Wjs, 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Riant Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara*

Berkembang (model-model perumusan implementasi dan evaluasi)

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Sugiyanto, 2002. *Lembaga Sosial*. Penerbit: Global Pustaka Utama

Sondang, Siagian P, 2001. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara

Veithzal Rivai, 2016. *Islamic Quality Education Manajement*, PT. Gramedia Jakarta

Wirosuharjo Karmoto, 2004. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: FEUI

1. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

PP No 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan

PP No. 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

PP No. 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Website

http://bsp.go.id/download_file/Penduduk_Indonesia_menurut_desa_SP2010.pdf diakses

http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=13792

<http://erwinredusir.wordpress.com/2012/08/01/laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-megkhawatirkan>

<http://aktualonline.com/view/sumut/sumut/3276/pertumbuhan-penduduk-kota-medan>

3. Jurnal

Rossy Lambelanova dan Muhammad Buyung Ramadhan. 2016 “Peranan BPPKB dalam melaksanakan program KB di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.”

LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Bapak dr. Edwin Effendi.

1. Kebijakan apa yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ini dalam mengendalikan jumlah penduduk di Kota Medan?
2. Mengapa Konseling KB itu Penting?

Pertanyaan wawancara kepada Kepala Bidang KB Bapak dr. Imam Surya.

1. Apa saja bentuk kerjasama yang dijalani Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan lembaga pemerintahan lainnya?
2. Apakah ada kesulitan dalam menjalani bentuk kerjasama tersebut?
3. Mengapa di bagi wanita menikah harus di atas usia 16 tahun?
4. Apakah yang saat ini menjadi fokus perhatian DP2KB dalam hal penyuluhan tentang program KB tersebut?
5. Apakah fasilitas tentang program KB ini sudah maksimal diberikan oleh masyarakat?

Pertanyaan wawancara kepada Kasi Jaminan Pelayanan KB Ibu Dewi Murni.

1. Apa saja bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam menekan pertumbuhan penduduk di kota Medan?

Pertanyaan wawancara dengan Kasubag Penyusunan Program Ibu Syafriana SE

dan Ibu Tina Sabrina Selaku Kasi Data dan Informasi.

1. Sosialisasi apa sajakah yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kepada masyarakat?
2. Apakah ada sosialisasi lain selain sosialisasi langsung kepada masyarakat?

Pertanyaan wawancara kepada Staf Bidang Penyuluhan Ibu Harlinda

1. Apakah manfaat yang di dapat dari sosialisasi langsung dan sosialisasi dua arah kepada masyarakat itu sendiri?

Pertanyaan wawancara kepada Kasubag Umum Ibu Asimah.

1. Upaya apa yang telah dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB?
2. Faktor internal apasajakah yang menghambat DP2KB dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Pertanyaan wawancara kepada salah satu masyarakat Medan Marelan Ibu Sirait.

1. Siapa nama ibu?
2. Apakah ibu mengikuti program KB?

Pertanyaan wawancara kepada salah satu masyarakat Medan Deli Ibu Farida.

1. Apa menurut ibu manfaat dari program KB itu?

Pertanyaan wawancara kepada salah satu masyarakat Ibu Halimah, Ibu Wati dan Ibu Nancy.

1. Menurut pandangan ibu apakah program KB itu penting?
2. Apakah Ibu pernah mengikuti penyuluhan tentang program KB?
3. Apa alasan Ibu tidak mengikuti program KB?

Pertanyaan wawancara dengan PLKB Medan Deli Ibu Yanthi dan Ibu Sumiati.

1. Apakah sejauh ini masyarakat sulit atau tidak dalam pemahaman pemasangan alat kotrasepsi?
2. Apakah banyak masyarakat yang mengalami kegagalan dalam hal pemasangan alat kontrasepsi?

Pertanyaan Wawancara dengan Kasubag Bidang Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan atau program apa yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat dalam hal KB?

Pertanyaan Wawancara dengan Kasi Pendayagunaan PKB Bapak Abdul Rahim.

1. Apakah ada ajakan lain agar semakin banyak masyarakat yg ikut program KB?

Pertanyaan wawancara dengan staff DP2KB Ibu Berliana

1. Apakah dalam proses penyelenggaraan KB ada campur tangan dari pihak swasta?

Pertanyaan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Ibu Tritatih.

1. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh DP2KB agar program kerjanya dapat dilakukan secara maksimal.